

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan daerah merupakan suatu hal yang penting dalam bidang keuangan yang harus dibuat atau diterbitkan, karena laporan keuangan daerah adalah bentuk dari tanggung jawab aparatur pemerintah sebagai pengelola dana rakyat. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Mahmudi, 2003 dalam Adhi, 2013).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Huang *et al.*, (1999) dalam Sukmaningrum

(2012) dalam Sari (2014) menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat apabila suatu informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 71 Tahun 2010, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat kriteria tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari pemerintah (Juwita, 2013).

Furqan (2012) mengungkapkan bahwa laporan keuangan pemerintah bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya sesuai kebutuhan pengguna, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna, khususnya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Lalu informasi yang andal (dapat dipercaya) dalam laporan keuangan pemerintah berarti bahwa bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah mungkin saja relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan dan merugikan pengguna laporan keuangan.

Selanjutnya, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Sedangkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan dapat dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi-informasi yang disajikan dan mampu menginterpretasikannya. Hal ini dapat terlihat dari manfaat informasi yang disajikan tersebut terhadap pengambilan keputusan. Untuk itu, penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus menggunakan format/bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna harus diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah (Furqan, 2012).

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Disebut sebagai laporan keuangan yang berkualitas, apabila mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah

daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Adhi, 2013).

Laporan keuangan yang berkualitas harus disusun berbasis akrual, sesuai dengan yang telah ditetapkan pada PP No. 71 Tahun 2010, merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan berpedoman pada SAP, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Sari, 2014).

Perubahan aturan yang terjadi dalam tata cara penyajian laporan keuangan daerah di Indonesia, yaitu dari basis kas menjadi basis akrual membuat kemampuan atau *skill* dari aparatur pengelola laporan keuangan semakin dibutuhkan. Oleh karena itu, dibutuhkan tingkat pemahaman yang baik dan cepat dari para aparatur pemerintah agar bisa menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP dalam PP No 71 Tahun 2010.

Selain pemahaman terhadap SAP, agar laporan keuangan yang diterbitkan semakin berkualitas, dibutuhkan pula latar belakang pendidikan terhadap perangkat yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan tingkat latar belakang pendidikan yang tinggi dalam bidang akuntansi akan membantu dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas (Wiraputra, 2014).

Menurut Fontanella (2010) dalam Siahaan (2012), latar belakang pendidikan sebagai bagian dari kapasitas SDM merupakan salah satu elemen kunci dalam penyediaan dan pemanfaatan laporan keuangan pemerintah. Di Indonesia, kesiapan SDM pemerintah menuju tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan masih menjadi dilema. Negara kita masih kekurangan SDM yang mengelola keuangan negara khususnya yang berlatar belakang ilmu akuntansi.

Roviyantie (2011) dalam Diani (2014) menyebutkan bahwa Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Menurut tim GTZ-USAID/CLEAN Urban (2001) dalam Harifan (2009) dalam Diani (2014), pelaksanaan akuntansi dalam suatu instansi harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang cukup dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam struktur Pemerintah Daerah, SKPD merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan SKPD. Dalam dunia pemerintahan, setiap bagian

dalam pemerintahan harus diisi oleh orang yang tepat. Begitupun bagian keuangan yang harus diisi oleh SDM yang memiliki kompetensi dalam memahami akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya, dimana hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Wiraputra (2014).

Agar didapat informasi yang berkualitas dari laporan keuangan yang sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, maka diperlukan adanya Sistem Pengendalian Internal yang memadai. Di instansi pemerintah, sistem itu disebut sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan SAP, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi (Armando, 2013).

Penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian negara (Udiyanti, 2014). Penelitian yang dilakukan Hamdani (2011) pun mengungkapkan hal yang sama bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Sebuah organisasi juga harus mempunyai Sistem Informasi yang baik, sistem Informasi yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan disebut dengan Sistem Informasi Akuntansi, hal ini berlaku baik untuk organisasi bisnis maupun organisasi sektor publik seperti di Pemerintah Daerah (Laudon & Laudon, 2007 dalam Juwita, 2013). Sistem Informasi Akuntansi mengacu

pada PP No 56 tahun 2005 yang direvisi oleh PP No 65 tahun 2010, aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007, sistem ini berbasis pada jaringan komputer yang mampu menghubungkan dan mampu menangani konsolidasi data antara SKPD dengan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (disingkat SKPKD) sehingga data di Pemerintah Daerah dapat terintegrasi dengan baik.

Menurut Ahmad (2008) dalam Diani (2014), untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi. Juwita (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem informasi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi (Bodnar dan Hopwood, 1995). Penelitian yang dilakukan oleh Jawad (1997) tentang faktor-faktor yang menentukan kesuksesan implementasi sistem teknologi informasi, menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh seperti faktor teknologi, faktor organisasi, faktor manajemen, faktor manusia, dan faktor eksternal (Ratifah, 2012).

Menurut Hahn, *et al.* (1992) dalam Ratifah (2012), salah satu metode untuk meningkatkan pengolahan informasi adalah meningkatkan tingkat keterlibatan anggota. Untuk keterlibatan anggota lebih tinggi dalam organisasi, salah satu alternatifnya adalah dengan meningkatkan komitmen organisasi mereka. Orang dengan komitmen yang lebih tinggi yang bersedia meluangkan waktu mereka untuk memproses informasi sesuai dengan deskripsi Schick *et al.* (1990) dalam Ratifah (2012). Streers (1977) menjelaskan bahwa komitmen organisasi dianggap mencerminkan kekuatan relatif dari identifikasi individu dan keterlibatan dalam organisasi tersebut (Ratifah, 2012). Pernyataan tersebut sesuai pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2013) bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Latar Belakang Pendidikan, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”**.

Penelitian ini mengembangkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2013) dengan judul “Pengaruh Pemahaman atas Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Sehingga variabel independen yang dikembangkan yakni Pemahaman terhadap SAP. Selanjutnya, penelitian ini menambahkan variabel independen lainnya yaitu latar belakang pendidikan yang diambil dari penelitian Muzahid (2014), Sistem Pengendalian Internal dari penelitian Hamdani (2011), Sistem Informasi Akuntansi dari penelitian

Yuliani (2010) serta komitmen organisasi dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Yusufadi (2013).

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih belum ada mengambil sampel di Yogyakarta yang notabene merupakan salah satu kota berdaya saing tinggi di Indonesia, sehingga sangat membutuhkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Hal tersebut yang menjadi motivasi peneliti melakukan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, latar belakang pendidikan, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, serta komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris dan menemukan suatu bahan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan, latar belakang pendidikan, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

a. Bidang teoritis.

- 1) Penelitian ini dapat memberikan tambahan literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah di Indonesia sehingga dapat memperkaya ilmu pengetahuan di Indonesia.
- 2) Sebagai salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang, khususnya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik.

b. Bidang praktik.

- 1) Bagi kalangan praktisi hasil dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas dalam penyusunan laporan keuangan daerah.